

SINERGI

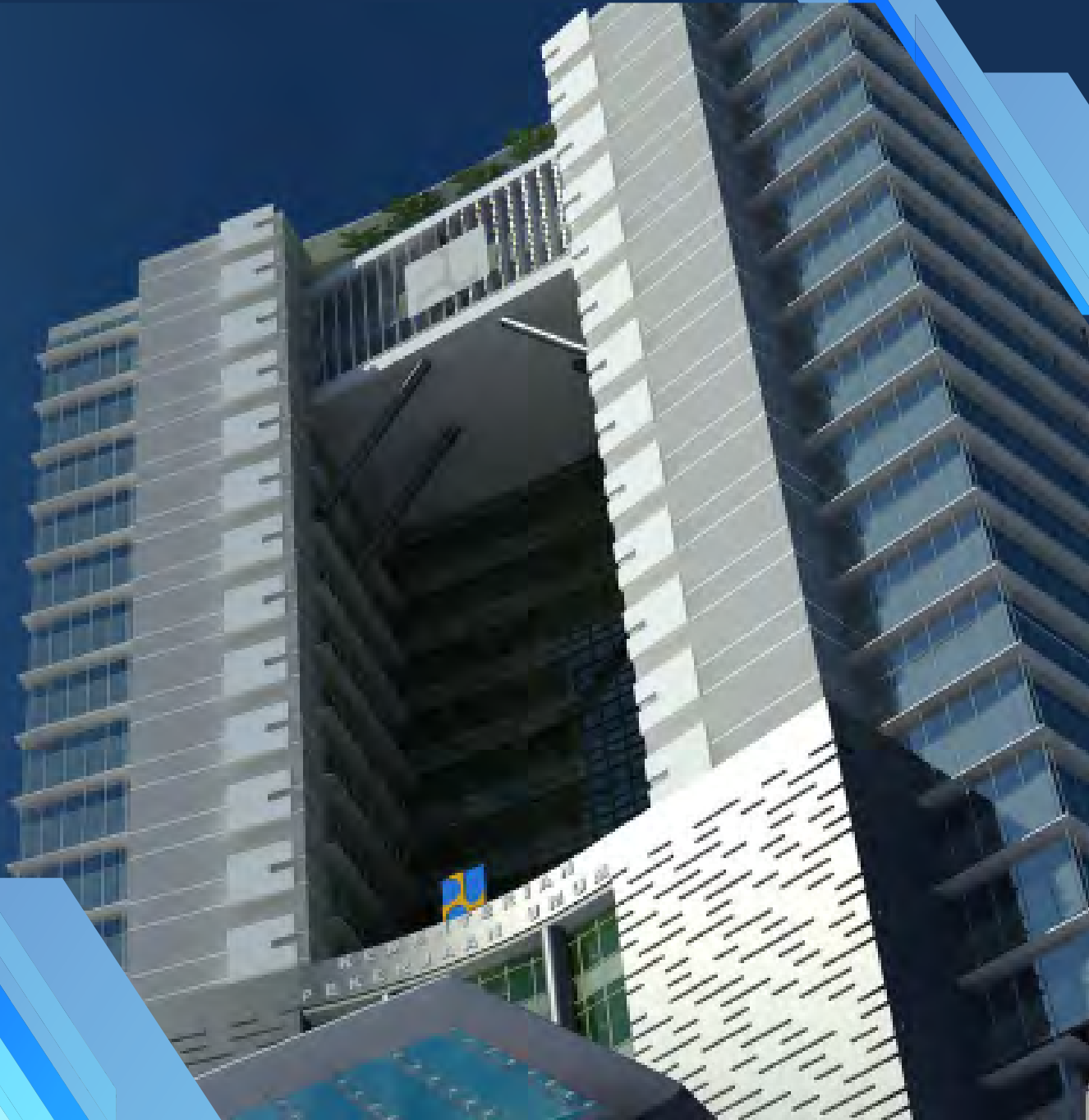
2020

2020, Spirit Baru BPIW





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com Telp. +6221-2751 5804

Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi edisi 43 ini merupakan edisi terakhir untuk tahun 2019. Pada edisi ini ditampilkan kegiatan pilihan yang telah dilakukan BPIW sejak Januari hingga Desember 2019.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan BPIW sepanjang tahun ini seperti pelaksanaan Konsultasi Regional dan serah terima penggunaan sementara Anjungan Cerdas Rambut Siwi di Jembrana Bali dan Trenggalek Jawa Timur, dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah setempat.

Peran BPIW terkait *side plan* relokasi penduduk pasca bencana di Palu dan penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) juga dihadirkan di rubrik Kaleidoskop. Selain itu redaksi juga menyajikan dokumentasi kegiatan di bulan Desember dalam rubrik Potret.

Kami berharap sajian informasi yang kita tampilkan di Buletin Sinergi sepanjang tahun ini dapat memenuhi harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Semoga ditahun yang baru, kualitas buletin semakin baik. Demikian pula dengan BPIW semoga dapat terus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Selamat Tahun baru 2020. Semoga perencanaan infrastruktur PUPR yang sudah disusun dapat terealisasi dengan baik dan semakin memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW

Tim Penyusun

Pengarah:
Hadi Sucahyono

Penanggung Jawab:
Firman H. Napitupulu

Penasihat
Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Kuswardono
M. Rudy Siahaan

Pemimpin Redaksi
P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana
Shovich

Staf Editor :
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Tim Kontributor Pemberitaan

Sekretariat:
Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design Grafis : Heri Hito
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



4 Kabar Utama: 2020, Spirit Baru BPIW

daftar isi



13 **Kaleidoskop 2019**
Rangkuman kegiatan BPIW



14 **Kegiatan Januari**
BPIW Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan
Pra Konreg 2019



54 **Potret**
BPIW Turut Semarakkan Kegiatan
Harbak PU ke-74

2020, Spirit Baru BPIW



Anjungan Cerdas di Jembrana Bali merupakan salah satu hasil dari program yang dibuat BPIW.

Sumber: BPIW

Sepanjang 2019 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menghasilkan produk unggulan yang dapat dipergunakan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/Lembaga lain. Kerja sama dan koordinasi juga sudah dilakukan baik internal maupun eksternal. Di 2020, akan dilakukan penguatan organisasi BPIW dengan perubahan struktur organisasi dan memaksimalkan potensi yang ada.

Sejak didirikan 2015 lalu, BPIW diamanatkan untuk membuat perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR yang menjadi panduan bagi unor-unor lain di Kementerian PUPR. Amanat itu terus dilaksanakan, di mana 2019 BPIW telah mengeluarkan, setidaknya 27 macam produk yang dapat dipergunakan unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa yang menjadi produk unggulan BPIW.

Kepala BPIW Hadi Suahyono menjelaskan, produk unggulan yang paling utama yang dihasilkan BPIW adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024. Mengapa menjadi produk unggulan?, karena itu merupakan produk lima tahun sekali. Hal ini berbeda dengan produk lain yang dihasilkan setiap tahunnya.

“Renstra tersebut bukan hanya bicara soal BPIW tapi juga semua unor di Kementerian PUPR. Di Renstra, selain kita bicara target volume

sektor seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan, tapi juga bicara perkiraan pendanaan, baik APBN maupun non APBN,” ujar Hadi saat diwawancarai di ruang kerjanya, 20 Desember lalu.

Di dalam Renstra tersebut juga akan dimasukkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang menjadi *tools* dalam pembangunan infrastruktur sektor. Dengan demikian, secara otomatis WPS memiliki dasar hukum mengingat Renstra akan disahkan melalui Keputusan Menteri PUPR atau Peraturan Menteri PUPR.

Saat ini BPIW sedang mereview WPS. Hal ini harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman yang sudah berubah pesat. “Pembangunan infrastruktur sektor PUPR yang telah dilakukan telah membuat beberapa perubahan. Misalnya suatu kawasan yang tadinya tidak ada jalan tol, sekarang ada jalan tol. Perubahan-perubahan seperti ini yang perlu disesuaikan dalam WPS,” ungkap Hadi.

Selain Renstra, unggulan lain dari BPIW adalah produk-produk 2019. Setidaknya ada 27 produk yang telah disampaikan ke unor-unor yang dapat dijadikan rujukan.

Ada 15 indikator untuk *updating* WPS 2020-2024. Kelima belas indikator itu adalah *Major Project* RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, dan Kawasan Strategis Tematik seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI). Usulan Ibu Kota Negara juga menjadi indikator lainnya, termasuk juga Kawasan Metropolitan.

Selain itu juga ada indikator terkait Koridor Pengembangan Jalan Tol dan Jalan Utama Nasional (Trans/Lintas Pulau) baik yang sudah terbangun maupun yang belum, Bendungan Terbangun dan Rencana, serta Konektivitas Multimoda.

Kemudian ada indikator terkait Ibu Kota Provinsi, Kawasan Perbatasan/ Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dan Daerah Tertinggal. Indikator lainnya adalah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Lokpri Perbatasan, dan Kota Baru Kota Kecil. Jadi nantinya WPS akan terbentuk dari 15 indikator tersebut.

"Hal ini juga yang membedakan WPS dulu 2015-2019 dengan WPS 2020-2024. Contohnya dulu tidak ada usulan Ibu Kota Negara, sekarang ada. WPS itu gunanya sebagai dasar kita menyusun rencana lima tahun kedepan," tutur Hadi.

Selain Renstra, unggulan lain dari BPIW adalah produk-produk 2019. Setidaknya ada 27 produk yang telah disampaikan ke unor-unor yang dapat dijadikan rujukan.

Beberapa diantaranya adalah Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan *Asian Highway Network* untuk Mendukung KSPN Tanjung Kelayang dan KSPN

Muaro Jambi, Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur di Jawa Utara, dan Rencana Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Sulawesi sebagai Pusat Industri Berbasis Logistik, Maritim dan Lumbung Pangan Nasional.

Kemudian ada poduk terkait Analisa Hasil dan Manfaat serta Evaluasi Capaian Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 dan Pengembangan Sistem Pemrograman Infrastruktur PUPR (SIPro). Sistem ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses penyusunan program jangka pendek dan sinkronisasi program tahunan bersama unor-unor yakni Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.

Kemudian produk terkait Penyusunan Arah Program Prioritas Nasional Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Multimoda Konektivitas dengan Infrastruktur PUPR.

Selain itu Penyusunan Arah Program Prioritas Nasional Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan Industri, KEK, KSPN dengan Infrastruktur PUPR, Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam rangka Mendukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR di WPS 29 Ternate-Sofifi-Daruba.

Selanjutnya ada Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Strategis yakni WPS 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sulawesi Utara, Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR

TEKNOKRATIK RENSTRA

KEMENTERIAN PUPR 2020-2024

Capaian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019



Arah Kebijakan 2020 - 2024

- Pembangunan infrastruktur SDA yang lebih modern serta mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur SDA
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan jalan nasional dan jalan bebas hambatan untuk memperkuat keterkaitan pengembangan wilayah
- Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan
- Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan
- Peningkatan penyelenggaraan dan hasil pembangunan konstruksi yang berkualitas aman dan berkeselamatan
- Pengembangan inovasi teknologi dan mutu pelayanan lintas bidang pekerjaan umum dan perumahan
- Pengembangan sistem diklat untuk mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Peningkatan efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan
- Keterpaduan perencanaan, sinkronisasi pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan yang menjadi prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional
- Pembangunan kelembagaan dan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan sinergis yang dilirungi dengan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan

Program Pembangunan 2020-2024

- SDA**
- 36 Bendungan Selesai 2020-2024
 - 20 Pembangunan Bendungan Baru
 - 500.000 Ha Daerah Irigasi Baru
 - 22,26 m³/detik Ketersediaan Air Baku untuk Kebutuhan Air Minum, Industri dan Kawasan Unggulan
 - 68,11 m³/c/th Kapasitas Daya Tampung
 - Pengendalian Daya Rusak

- CIPTA KARYA**
- 75,34% Akses Air Minum Aman dan Layak
 - 90% Akses Sanitasi layak
 - 10.000 ha Penanganan Kumuh
 - 10 Pengembangan PLBN
 - Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Pasar

- BINA MARGA**
- 1.626 km Jalan Tol Beroperasi
 - 2.491 km Jalan Tol Baru Akan Dibangun
 - 3000 km Pembangunan Jalan Baru
 - 81.695 m Pembangunan Jembatan
 - 58.656 m Pembangunan Fly Over/Underpass

- PERUMAHAN**
- 100.000 Unif Public Housing
 - 52,78% Hunian Layak dan Terjangkau
 - 96% Hunian dengan Kecukupan Luas Lantai

Dalam membuat produknya, BPIW menggunakan Sidlacom sebagai pedoman. Istilah yang sering disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini merupakan rangkaian proses pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

kota baru Sofifi, dan Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kota Baru Maja.

Di November lalu juga BPIW telah menggelar BPIW Expo yang menampilkan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Beberapa *Policy Brief* juga telah dibuat seperti terkait dukungan Kementerian PUPR terhadap salah satu Kawasan Pariwisata Super Prioritas yakni Likupang, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Selor, dan terkait *side plan* relokasi masyarakat di Palu pasca bencana.

Dari sekian banyak produk BPIW itu, yang paling menonjol adalah terkait penyusunan rencana induk pariwisata yang terintegrasi atau *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) di tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika-Lombok. Penyusunan ITMP ini dibantu Bank Dunia dan melibatkan beberapa instansi

seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil dari produk ITMP ini diserahkan ke semua unsur dan kementerian terkait untuk dipergunakan sebagai acuan. ITMP yang dihasilkan berisi beberapa hal seperti matrik besar terkait program-program arahan per tahun.

Dalam membuat produknya, BPIW menggunakan Sidlacom sebagai pedoman. Istilah yang sering disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini merupakan rangkaian proses pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Sidlacom singkatan dari Survei, Investigasi, Disain, *land acquisition* (pembebasan tanah), *Construction* (konstruksi), *Operation* (operasi), dan *Maintenance* (pemeliharaan). “BPIW ada pada tahap survei, Investigasi, dan disain,” ucap Hadi.



Kepala BPIW Hadi Suahyono mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat kunjungan Presiden ke Danau Toba Juli lalu.

Sumber: BPIW



Pada 2020 BPIW akan menyusun ITMP Labuan Bajo.

Sumber: BPIW

Pada 2019 ini Hadi menilai internal BPIW semakin kompak dalam berkoordinasi dan bersinergi antar pusat dan bidang. Tidak hanya berkoordinasi di internal, koordinasi BPIW dengan kementerian/ lembaga lain semakin luas, tidak hanya dengan satu atau dua kementerian/ lembaga saja. “Pada 2019 BPIW sudah ada peningkatan kinerja, lebih baik dari sebelumnya, meski belum bisa disebut sempurna,” ujarnya.

2020 Organisasi BPIW Diubah

Di 2020, organisasi BPIW akan diubah, di mana perubahan tugas per pusat didasari pada pembagian

wilayah dan lintas tema yang sifatnya nasional. Jadi organisasi akan diperkuat sehingga tidak ada yang tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaannya.

Produk yang bersifat teknologi 4.0 seperti SIPro, Sistem Informasi dan *Database Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (Sibas Ripi), dan Sistem Monitoring Tanah (Simonah) juga akan diperbaharui.

Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPIW dihadapkan anggaran yang terbatas. Untuk mengatasi hal itu Hadi akan memaksimalkan keahlian dan

Produk yang bersifat teknologi 4.0 seperti SIPro, Sistem Informasi dan Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (Sibas Ripi), dan Sistem Monitoring Tanah (Simonah) juga akan diperbaharui.



Kekompakan dan kebersamaan dibutuhkan dalam peningkatan kinerja BPIW di 2020.

Sumber: BPIW

kemampuan para stafnya dalam mengerjakan semua tugas."Seperti yang telah dilakukan, kita akan melakukan tugas lintas bidang dan lintas pusat.

Dengan cara demikian diharapkan anggaran tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada BPIW," katanya. Perubahan struktur, pendekatan proses menghasilkan produk, dan pengerjaan produk akan menjadikan BPIW menjadi *New BPIW*.

Program-program yang telah dilaksanakan di 2019 dilanjutkan di 2020 seperti ITMP yang akan dilanjutkan dengan penanganan KSPN Wakatobi, Bromo-Semeru-Tengger, dan Labuan Bajo.

Pelaksanaan Konsultasi Regional di 2020 akan lebih efisien dibandingkan dengan 2019 karena lebih memaksimalkan teknologi *teleconference* untuk membahas program-program infrastruktur untuk 2021.



Lokasi daerah yang akan menggunakan *teleconference* ini akan dipilih, terutama daerah yang mudah untuk dijangkau dan mendukung dari sisi teknologi komunikasinya. Misalnya untuk kawasan Indonesia bagian barat seperti pulau-pulau di Sumatera, sinkronisasi program antara pusat dan daerah bisa menggunakan *teleconference*, karena wilayahnya tidak terlalu jauh dan teknologinya juga memadai.

Lain halnya dengan kawasan timur

Indonesia yang jaraknya terlalu jauh seperti di Papua. Untuk daerah ini sinkronisasi program bisa dilakukan langsung di daerah tersebut. Program-program yang dihasilkan dari pelaksanaan Konreg ini akan terus dikawal BPIW hingga pelaksanaan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan benar-benar terealisasi dengan baik.

Di sisi lain, produk yang belum selesai di 2019 akan diselesaikan secara tuntas di 2020. "Misalnya



Pembukaan Konsultasi Regional di Aceh.

Sumber: BPIW

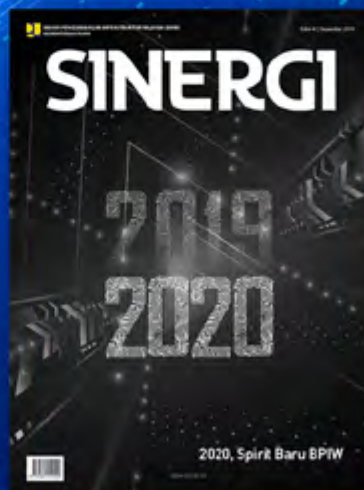
Dengan memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki para insan BPIW diharapkan produk-produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk semua pihak.

Renstra, kita akan selesaikan segera, meski masih tergantung dari Bappenas, karena Renstra yang akan kita selesaikan harus mengacu RPJMN yang saat ini tengah dibuat Bappenas,” tutur Hadi.

Dengan memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki para insan BPIW diharapkan meningkatkan kekompakan agar produk-produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk semua pihak.

Hadi optimis hal itu bisa terwujud mengingat 2020 organisasi BPIW merupakan organisasi yang baru sehingga sistem kerja sama antar unit organisasi lebih jelas dan lebih optimal. **(Redaksi)**

Kaleidoskop 2019



Sumber: PUPR

Sepanjang 2019, BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kegiatan yang telah dilakukan dimuat di buletin Sinergi yang setiap edisi terbit (dengan tampilan cover yang tergambar di atas). Selain di buletin, kegiatan BPIW juga dimuat di website. Dari sejumlah berita, kali ini tim redaksi Buletin Sinergi merangkum kegiatan-kegiatan penting BPIW di sepanjang tahun 2019. Berikut ulasannya pada Kaleidoskop 2019 :

BPIW Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Pra Konreg 2019

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi *Pradesk* Konreg 2019 dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan bentuk upaya memperkuat konsolidasi di internal Kementerian PUPR. "Agar dalam pelaksanaan Pra Konreg 2019 pada Februari mendatang, pemahaman internal Kementerian PUPR sama," ungkap Hadi di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi *Pradesk* Konreg 2019 di Jakarta, Selasa (1/8).



01

Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia menggelar sosialisasi "Pengelolaan Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)" di Jakarta, Kamis (10/11).

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, proses *loan* untuk *Integrated Tourism Development Project* (ITDP) saat ini telah berjalan sesuai yang direncanakan. "Total dana yang akan dicairkan Bank Dunia dalam pengembangan pariwisata di Tanah Air mencapai sebesar 300 juta dolar Amerika," ungkap Hadi



Pemerintah Gelar Sosialisasi P3TB

Januari

Kementerian PUPR Tingkatkan Sinergitas Aksi Antar Lembaga

Untuk percepatan dalam mewujudkan pembangunan hunian tetap (hunatap) relokasi pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian PUPR kembali menggelar rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Kantor BPIW, Jakarta (15/1/2019)

Rapat koordinasi kali ini dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Perumahan. "Adapun pembahasan utama adalah menggali perkembangan status lahan di lokasi rencana hunatap dan mekanisme pembiayaan pembangunan hunatap," jelas Hadi.



Guna memudahkan dalam pengadaan tanah untuk relokasi hunian tetap (hunatap) pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor BPIW, Jakarta

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menjelaskan, saat ini telah disepakati ada empat lokasi sebagai zona aman pasca bencana di kawasan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

BPIW-BPN Koordinasi Pengadaan Tanah Hunatap di Sulteng



BPIW dan Tata Ruang Perkuat Koordinasi

Guna melancarkan proses pengembangan kota berkelanjutan yang terpadu di Tanah Air dalam *National Urban Development Program* (NUDP) yang didukung Bank Dunia, BPIW dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/1).

Kepala BPIW, Hadi Suahyono mengungkapkan, rapat koordinasi saat ini dilakukan untuk melakukan sinkronisasi dan penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait NUDP. "Dalam NUDP akan banyak melibatkan kementerian/ lembaga, namun yang paling dominan terlibat adalah Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian ATR/BPN serta Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, -red),"



01

Kepala BPIW, Hadi Suahyono bersama *Japan International Cooperation Agency* (JICA) melakukan peninjauan ke beberapa tempat di Sulawesi Tengah, Jumat (18/1). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lahan empat kawasan yang akan dijadikan relokasi penduduk pasca bencana di Palu, Donggala, dan Sigi yang terjadi tahun lalu.

Keempat kawasan yang akan dijadikan relokasi penduduk itu adalah Duyu, Tondo, Pombewe, dan Petobo. Koordinasi yang dilakukan dengan JICA untuk memastikan empat kawasan tersebut benar-benar aman untuk dihuni.



BPIW dan JICA Tinjau Lahan Relokasi di Sulteng

Januari



BPIW Bentuk Komunitas Bersepeda

Penggemar olahraga bersepeda di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk komunitas sepeda yang disebut SOBAT (Sepedaan Orang BPIW Asyik Tenan). Komunitas ini resmi diluncurkan di kawasan *Car Free Day* Sudirman-Thamrin, Jakarta, (20/1).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono berharap, dengan terbentuknya SOBAT dapat meningkatkan sinergitas dan mempererat silaturahmi internal para pegawai di lingkungan BPIW. "Launching ini merupakan kegiatan awal SOBAT. Kedepannya SOBAT harus menjadi ajang yang rutin dengan mengambil rute ke tempat-tempat yang representatif dan nyaman," terang Hadi.

Dalam upaya mewujudkan percepatan serah terima anjungan cerdas Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono saat menyampaikan sambutannya mengatakan, Kementerian PUPR akan menyerahkan pengelolaan Anjungan Cerdas Tugu secara penuh pada Pemkab Trenggalek.

Pemkab Trenggalek Kunjungi BPIW



BPIW Tajamkan Strategi untuk Pengembangan Perkotaan Melalui NUDP

Guna mewujudkan pengembangan kota berkelanjutan terpadu yang tepat sasaran melalui *National Urban Development Program* (NUDP), BPIW Kementerian PUPR kembali melakukan penajaman strategi dengan menggelar "Rapat Pembahasan Usulan Kriteria Penentuan Kota Calon Penerima Manfaat Program NUDP," di Kantor BPIW.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menjelaskan, NUDP yang didukung Bank Dunia ini merupakan kolaborasi dalam pengembangan perkotaan yang menyatukan program investasi infrastruktur.



01
Januari

Kementerian PUPR memastikan pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, meningkatkan daya saing serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia.

Demikian diungkapkan Hadi Sucahyono saat memaparkan "Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertahanan Negara" mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2019 di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta Timur, Rabu (30/1).



Infrastruktur untuk Persatuan NKRI

02

Februari

KBM Tanjung Selor Diproyeksikan Jadi Pusat Pemerintahan

Kementerian PUPR melalui BPIW tengah menyusun *review* dan strategi implementasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan.

KBM Tanjung Selor diharapkan mampu memberikan pelayanan skala provinsi untuk beberapa kota dan kabupaten sekitarnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor memiliki posisi yang strategis dalam pertumbuhan kawasan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.

BPIW tengah menyusun perencanaan yang mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana di Kementerian PUPR. Demikian terungkap dalam Diskusi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR dan Mitigasi Bencana di Kantor BPIW.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Bobby Prabowo saat memberikan arahan mengatakan, perencanaan dan program Kementerian PUPR perlu memuat hal yang tanggap risiko bencana, agar dapat melakukan pengurangan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.

Perencanaan Infrastruktur PUPR Adopsi Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana



BPIW Sambut Kunjungan HMGP UGM



Keahlian bidang geografi sangat membantu dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono yang didampingi pejabat dan staf BPIW saat menyambut kunjungan Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan (HMGP), Universitas Gajah Mada (UGM) ke Kantor BPIW Kementerian Pekerjaan PUPR di Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Hadi menyatakan, dalam organisasi Kementerian PUPR BPIW memiliki tugas dan fungsi sebagai perencana. Kemudian, Sekretariat Jenderal (Sekjen) memiliki tugas dan fungsi sebagai pengorganisasian, Inspektorat Jenderal (Irjen) memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawasan.

02

Kementerian PUPR berkomitmen untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Sofifi di Provinsi Maluku Utara. Terlebih, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 KBM Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru yang dicanangkan untuk berkembang.

"Guna mendukung percepatan pengembangan KBM Sofifi, Kementerian PUPR melalui BPIW akan segera melakukan *review* dan penajaman MPDP (*Masterplan dan Development Plan*, -red) KBM Sofifi," ungkap, Hadi Sucahyono, Jumat, 8 Februari 2018.



Percepatan Pengem- bangan KBM Sofifi

Februari



BPIW Matangkan Rencana Implementasi NUDP

BPIW bersama Bank Dunia melaksanakan kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP). Untuk mematangkan implementasi program tersebut menggelar rapat koordinasi pada Jumat, 8 Februari 2019.

“Kami sangat mengharapkan masukan, sehingga nanti akan menjadi bahan penyempurnaan,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga.

Agusta menjelaskan sasaran utama dari NUDP adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kota pada perencanaan terintegrasi dan prioritas investasi. Pencapaian tujuan utama NUDP akan diukur dengan beberapa indikator, seperti rencana tata ruang kota.

BPIW turut berpartisipasi dalam PUPR 4.0 *Expo* yang digelar di Ruang Serbaguna, Gedung Utama Kementerian PUPR, 11 Februari-15 Maret 2019. BPIW menampilkan beragam sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kinerja terkait perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka acara pada Senin, 11 Februari 2019 mengatakan, PUPR 4.0 *Expo* merupakan ajang memperlihatkan pencapaian masing-masing direktorat jenderal dan unit organisasi di Kementerian PUPR.

Partisipasi dalam PUPR 4.0 Expo



Peran Penting Generasi Millenial

Generasi muda atau milenial memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di era industri 4.0. Generasi muda dengan keahlian khusus di berbagai bidang saat ini sangat dibutuhkan sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam mempercepat pencapaian sasaran pekerjaan infrastruktur PUPR.

Demikian diungkapkan Hadi Sucahyono dalam Forum Diskusi PUPR 4.0 *Expo* yang bertajuk “Peran Generasi Muda dan Kampus dalam Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur PUPR” di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/2).



02

Untuk penyediaan infrastruktur perkotaan dalam implementasi *New Urban Agenda* (NUA) dan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPIW menggelar “Curah Pendapat Strategi Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Mendukung *New Urban Agenda*” di Jakarta.

Hadi Sucahyono mengatakan, BPIW sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR mengemban amanah antara lain, menyusun kebijakan dan strategi, rencana serta program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perdesaan, termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan Infrastruktur PUPR.



Curah Pendapat Strategi Pengembangan Perkotaan

Februari

Fokus Dukung Empat KSPN

BPIW tahun ini merencanakan fokus pengembangan infrastruktur PUPR terhadap empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari 12 KSPN yang juga terus dikembangkan. Keempat KSPN tersebut urutannya, Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat jumpa pers di arena PUPR 4.0 Expo, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Ia merinci, 12 KSPN tersebut Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandeh, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Bromo-Tengger-Semeru, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Toraja, Morotai dan Wakatobi.

Kementerian PUPR menggelar Konsultasi Regional (Konreg) yang membahas perencanaan infrastruktur sektor PUPR untuk tahun anggaran 2020 di Mataram, Rabu 20 Februari 2019. Kegiatan di Kota Mataram digelar pada 20 hingga 22 Februari. Konreg di Mataram diikuti beberapa provinsi di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Selain Mataram, konreg akan digelar secara maraton di Makassar, Aceh, dan Bogor.

Saat memberi sambutan mewakili Menteri PUPR, Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan salah satu dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pesan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Jakarta.



BPIW Gelar Konreg di Mataram



Rencana Pengelolaan Rest Area Terpadu



02
Februari

Guna mematangkan persiapan pengelolaan Rest Area Terpadu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar "Pembahasan Potensi Pengelolaan Rest Area Terpadu Tugu dan Rambut Siwi" di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2019.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono saat menyampaikan arahnya mengatakan, pada akhir tahun 2018 BPIW telah menyelesaikan pembangunan dua Rest Area Terpadu, yakni Rest Area Terpadu Tugu di Trenggalek, Jawa Timur dan Rest Area Terpadu Rambut Siwi di Jembrana, Bali. "Sesuai arahan Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR berkomitmen akan menghibahkan secara penuh Rest Area Terpadu kepada pemerintah daerah," ungkap Hadi.

BPIW kembali melakukan terobosan baru. Kali ini, Kementerian PUPR untuk pertama kalinya menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh atau melalui *video conference* dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, 25 Februari 2019.

Pada Konreg melalui *video conference* ini, Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta dan Pemprov Kalsel di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI, Banjarmasin, Kalsel.



Konreg Video Conference dengan Kalsel

03
Maret



Konreg di Kota Makassar

Setelah sukses melaksanakan Konsultasi Regional (Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu, BPIW kembali menggelar Konreg di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (28/2/2019).

Konreg yang berlangsung selama dua hari di Kota Anging Mamiri ini, dilaksanakan untuk membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengungkapkan, salah satu dasar pelaksanaan Konreg adalah pesan Presiden RI, Joko Widodo.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh atau Konreg melalui *video conference*, Senin (4/3/2019).

Konreg jarak jauh saat ini dilakukan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Pada pelaksanaan konreg tersebut, Kementerian PUPR melaksanakan di *ICT Room*, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI, Manado, Sulut.

Konreg Jarak Jauh dengan Sulut



Konreg PUPR di Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menggelar Konsultasi Regional (Konreg). Kali ini, Konreg ketiga digelar di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (10/3).

Konreg yang dilaksanakan selama tiga hari ini, dibuka langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala guna membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sumatera. Pembukaan turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah beserta jajaran dan para undangan.



03

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Danau Toba. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) nomor satu di Tanah Air.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, secara nasional ada 12 KSPN yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. "Dari 12 KSPN itu ada tiga yang menjadi super prioritas, yakni, KSPN Danau toba, Borobudur dan Lombok," ungkap Hadi.

Dukung Percepatan Pengem- bangan Danau Toba

Maret

Konreg Jarak Jauh dengan Sumut

Setelah sukses menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh melalui *video conference* dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian PUPR melalui BPIW kembali menyelenggarakan Konreg jarak jauh dengan Pemprov Sumatera Utara (Sumut), Kamis (14/3/2019). Untuk pelaksanaan konreg jarak jauh dengan Pemprov Sumut, jajaran Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta sedangkan Pemprov Sumut di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III di Medan, Sumut.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) terakhir di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/3).

Konreg yang diselenggarakan di Kota Hujan ini untuk membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di enam provinsi wilayah Jawa dan Bali, yakni Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah (Jateng) dan Bali.

Adapun Konreg untuk Provinsi Jawa Timur (Jatim) dilakukan secara jarak jauh melalui *video confrence*.

Kementerian PUPR Konreg di Jabar



Konreg Jarak Jauh dengan Jatim

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh terakhir dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kamis (21/3).

Pada pelaksanaan Konreg jarak jauh terakhir ini, Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta sedangkan Pemprov Jatim di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII di Surabaya, Jatim.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto, saat membuka kegiatan menyatakan, pelaksanaan Konreg jarak jauh dengan Pemprov Jatim merupakan penyelenggaraan yang keempat dan sesi terakhir di Konreg 2019.



03
Maret

BPIW memastikan membuka peluang kepada masyarakat luas untuk turut berperan aktif dalam perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR di Indonesia.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono yang didampingi jajaran pejabat dan staf BPIW saat menerima kunjungan Alumni Rancang Kota Institut Teknologi Bandung (Arki) dan mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Rancang Kota ITB di Kantor BPIW, Senin (25/3/2019). Dalam sambutannya, Hadi menerangkan, Kementerian PUPR memiliki sejumlah unsur yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan misi organisasi. "Di antaranya, BPIW yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perencana pengembangan infrastruktur wilayah," terangnya.



BPIW dan Arki Jajaki Peluang Kerja Sama

04
April



Dukung Percepatan Pengembangan KPPN

BPIW mendukung penuh langkah-langkah percepatan pengembangan seluruh Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono dalam “Rapat Koordinasi Implementasi Program dan Kegiatan pada KPPN” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, (28/3).

Agusta mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW pada 2016 hingga 2018 telah melaksanakan penyusunan 20 *masterplan* KPPN. “Yakni tahun 2016 ada empat *masterplan* KPPN, tahun 2017 ada sepuluh *masterplan* KPPN dan tahun 2018 ada enam *masterplan* KPPN,” terangnya.

Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur PUPR terpadu di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya, pembangunan infrastruktur merupakan syarat fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Saat ini percepatan pembangunan infrastruktur merupakan suatu kebutuhan, termasuk pembangunan di Maluku Utara,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono mewakili Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi, (10/4/2019).

Dukung Percepatan Pembangunan di Malut



Pembangunan Infrastruktur untuk Kalteng

Kementerian PUPR telah menghasilkan beberapa program pembangunan infrastruktur yang siap dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun depan.

“Program infrastruktur sektor PUPR tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang telah diadakan pada Februari dan Maret lalu,” ujar Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Suchayono saat menjadi salah satu pembicara mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalteng di Palangkaraya, (8/4/2019).

04



Pembangunan infrastruktur sektor PUPR di Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa tantangan seperti masih ada ratusan desa yang sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu salah satu program yang akan dilakukan Kementerian PUPR tahun 2020 adalah Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional seperti di Sambas, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Selain itu menurut Hadi Suchayono Kementerian PUPR juga akan membangun Rumah Khusus Nelayan di Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. “Hal ini dilakukan mengingat kabupaten tersebut merupakan yang termiskin di Kalimantan Barat,” tutur Hadi yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menjadi salah satu pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, (11/4).



Dukung Penanganan Desa Tertinggal di Kalbar

April

BPIW memastikan pada tahun 2019 penyerapan dana *loan* untuk *Integrated Tourism Development Project* (ITDP) dari Bank Dunia akan maksimal. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti di Ruang Rapat Sekjen Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (16/4).

Hadi yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kuswardono memaparkan, ruang lingkup ITDP antara lain meliputi penyusunan tiga *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP), yakni ITMP untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba dan Lombok.

Penyerapan Dana ITDP akan Maksimal

BPIW akan mendapat penempatan 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu terungkap di sela-sela acara Pelepasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2017 dan Penyerahan Calon PNS (CPNS) 2018 Kementerian PUPR di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (22/4). "50 PNS itu terdiri dari 24 PNS formasi 2017 dan 26 CPNS formasi 2018," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono. Menurut Hadi, penempatan PNS baru di BPIW diharapkan akan mampu memberikan warna positif dan meningkatkan kinerja BPIW ke depannya.



BPIW Menerima Penempatan 50 PNS Baru



BPIW Memiliki Fungsi Strategis



BPIW memiliki peranan penting dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR hulunya dari perencanaan yang dilakukan BPIW.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat paparan “Peran BPIW dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional” dalam Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (23/4).

Hadi menyatakan, BPIW sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 03/PRT/M/2019 memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Kementerian PUPR bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen memantapkan pengembangan Kota Pusaka di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi BPIW Kementerian PUPR dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (26/4).

Rapat tersebut dihadiri Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono beserta jajaran dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid beserta jajaran. Hadi mengungkapkan, saat ini pengembangan kota termasuk kota tematik mendapat dukungan dari Bank Dunia melalui *National Urban Development Program* (NUDP).



Pengem- bangan Kota Pusaka

April



BPIW Gelar *Coffee Morning*

Guna meningkatkan komunikasi internal dan kekompakan, jajaran BPIW kembali menggelar *Coffee Morning*. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (26/4) tersebut membahas dua tema sekaligus, yakni kajian kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan konsep teknokratik Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Kepala BPIW Kementerian PPR, Hadi Sucahyono dalam arahannya mengatakan, kegiatan *Coffee Morning* perlu rutin digelar agar segala isu penting dapat diketahui para pegawai. "Untuk kemudian secara bersama-sama dilakukan langkah-langkah solusinya," ujar Hadi.

Hadi mengatakan, pelaksanaan *Coffee Morning* ini dapat dilakukan dua minggu sekali. "Kalau isu yang harus dibahas banyak, dapat digelar setiap jumat," katanya.

Kementerian PUPR siap untuk menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam pertemuan akbar majelis *The United Nations Habitat (UN Habitat) Assembly* di Nairobi, pada 27-31 Mei 2019.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menghadiri pertemuan dengan Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk Nairobi, Soehardjono Sastromihardjo di Jakarta, Senin (29/4).

Hadir pula perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, serta Kementerian Luar Negeri.

BPIW Dukung *UN Habitat Assembly*



26 CPNS Jalani *On The Job Training*

Seiring
tingginya
tantangan yang dihadapi
BPIW Kementerian PUPR, para
CPNS formasi 2018 yang ditempatkan
di lingkungan BPIW diharapkan terus
mengembangkan diri dan menjaga disiplin agar
memberikan warna dan kinerja yang positif untuk
BPIW ke depannya.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono dihadapan 26 CPNS saat membuka kegiatan *On The Job Training* dan *Mentoring* di ruang rapat BPIW. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo, Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW, Hasna Widiastuti serta pejabat perwakilan berbagai bidang di lingkungan BPIW.



05

BPIW dengan Bank Dunia melakukan kerja sama menggelar *knowledge sharing* terkait pengembangan perkotaan di masa depan. Kegiatan *knowledge sharing* tersebut dilaksanakan di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (8/5). Hadir pada acara tersebut pejabat dan staf dari BPIW serta Bank Dunia.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono saat membuka acara mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah pencerahan dan cara yang efektif bagi jajaran BPIW dalam upaya melakukan pengembangan infrastruktur PUPR di Tanah Air.



BPIW dan Bank Dunia Gelar *Knowledge Sharing*

Mei

NUDP Dukung Pengembangan Kota-Kota di Indonesia

Bank Dunia berkomitmen akan merealisasikan pinjaman anggaran sebesar US\$ 49,6 juta untuk pengembangan kota-kota di Indonesia. Hal itu terungkap dalam penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Bank Dunia untuk *National Urban Development Program* (NUDP) di Kantor Bank Dunia, Jakarta, (17/5/2019).

Dalam penandatanganan perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia diwakili Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan, Scenaider C.H. Siahaan dan Bank Dunia.



Bank Dunia mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang telah mengelola proses *loan Integrated Tourism Development Project* (ITDP) sesuai harapan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Peninjauan Perkembangan Implementasi Proses ITDP di Kantor BPIW, Selasa, (14/5/2019).

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta perwakilan Bank Dunia.

Bank Dunia Apresiasi Pemerintah RI



Percepatan Pengembangan Kawasan PLBN

BPIW Kementerian PUPR menyusun rencana pengembangan pusat-pusat permukiman di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal itu terungkap dari Rapat Koordinasi BPIW dengan pihak terkait di tingkat pemerintah daerah pada Kamis, 9 Mei 2019 di Kantor Bupati Kupang dan Jumat, 10 Mei 2019 di Kantor Bupati Timor Tengah Utara (TTU).

Rapat ini ditujukan sebagai langkah awal menjangkau aspirasi daerah dalam menyusun dokumen masterplan kawasan perbatasan Oepoli dan Napan. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Sinulingga mengatakan ada 6 Strategi dalam mengembangkan daerah perbatasan, yaitu mengembangkan pusat ekonomi, konektivitas simpul transportasi utama, membangun sumber daya manusia perbatasan, meningkatkan arus perdagangan ekspor impor, pengembangan kawasan budidaya secara produktif, dan membangun dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan lingkungan.



05
Mei

BPIW tengah menyusun Rencana Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana ini disusun berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti amanah Keputusan Presiden No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Untuk itu, BPIW mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat (8/5/2019) di Kantor Bupati Rote Ndao. Agusta Ersada Sinulingga sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penjangkauan aspirasi daerah dalam rangka penyusunan *Masterplan*, *Development Plan*, *Pra Studi Kelayakan*, dan *Pra Desain Kota Kecil Ba'a* Kab. Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur.

Inisiasi Pengembangan Kota Kecil



06
Juni



Silaturahmi dan Halalbihalal BPIW

BPIW Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna memenuhi tugas dan fungsi yang diemban.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Hadi Sucahyono saat menyampaikan sambutan dalam Silaturahmi dan Halalbihalal Keluarga Besar BPIW di Auditorium, akhir pekan kemarin.

Hadir pada acara tersebut Kepala BPIW periode 2015-2017, A. Hermanto Dardak, Kepala BPIW periode 2017-2018, Ridho Matari Ichwan, dan Plt. Kepala BPIW Periode 2018, Lana Winayanti, serta Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan, Gani Ghazaly Akman. Selain itu juga hadir para eks pegawai BPIW, dan seluruh staf BPIW.

Penajaman pembahasan rencana pengembangan Kota Baru di Jayapura terus dilakukan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara BPIW dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga di kantor BPIW, Rabu (12/6).

Rapat ini dihadiri Bupati Jayapura, Mathius Awaitaouw, perwakilan dari Bappeda Jayapura, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Agusta mengatakan, Jayapura merupakan salah satu lokasi yang direncanakan terdapat kota baru.

Pembahasan Kota Baru di Jayapura



Anggaran BPIW 2020 Sebesar Rp 199,3 M

Pagu indikatif penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk BPIW Kementerian PUPR diperkirakan sebesar Rp 199,3 Miliar. Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, (17/6/2019).

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono memaparkan, pagu anggaran BPIW TA 2020 akan dialokasikan untuk mendukung tujuan tugas dan fungsi BPIW menyelenggarakan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR.



06
Juni

Guna melakukan percepatan dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok secara terpadu yang didukung Bank Dunia melalui *Integrated Tourism Development Program* (ITDP), Pemerintah terus menguatkan dan menajamkan substansi *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP)/Rencana Induk Pariwisata Terpadu KSPN Lombok. Demikian terungkap dalam kunjungan lapangan bersama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/6).

Kunjungan lapangan bersama tersebut dilakukan perwakilan Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenpar, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), serta *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC).



Percepatan Pengembangan KSPN Lombok

07
Juli

BPIW Libatkan Pakar Perkotaan

Guna mendapatkan kesamaan pemahaman terhadap *National Urban Development Program* (NUDP) dalam rangka pengembangan kota-kota di Indonesia yang didukung Bank Dunia, BPIW menggelar Seminar Pemantapan Konsep Desain NUDP di Jakarta, Selasa (3/7/2019).

Seminar yang diikuti jajaran pejabat dan staf BPIW ini, menghadirkan Pakar Perkotaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tommy Firman, Pakar Pengembangan Wilayah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi dan Pakar Ekonomi Perkotaan dari Universitas Indonesia (UI), Komara Djaja.



Rencana pembangunan Jembatan Pulau Batam-Pulau Bintan terus dikaji keterpaduannya dengan pengembangan wilayah/kawasan serta daya dukungnya. Saat ini, Program pembangunan jembatan ini sudah disebut di dalam peraturan pemerintah berupa Peraturan Presiden, RPJMN 2020 - 2024, dan RTR Pulau Sumatera sehingga termasuk program yang mendapatkan perhatian khusus.

BPIW menindaklanjuti rencana ini dengan kajian dan survei lapangan. Kepala BPIW didampingi Tim BBPJN /P2JN Provinsi Kepulauan Riau melakukan survei ke lapangan (4/7/2019).

Survei Pembangunan Jembatan Batam-Bintan



BPIW Susun Buku SOIC 2019

Perkembangan perkotaan yang pesat di dunia termasuk Asia membuat UN Habitat membutuhkan perspektif dan informasi dari perkembangan kota-kota di Indonesia.

Demikian diungkapkan Hadi Suchayono saat membuka Rapat Persiapan Penyusunan Buku *The State of Indonesian Cities* (SOIC) 2019 di Kantor BPIW, Jumat (5/7).

Hadir juga pada rapat tersebut Widyaiswara Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan, Imam S Ernawi serta jajaran pejabat di lingkungan BPIW. Untuk itu, ujar Hadi, BPIW perlu menyusun buku SOIC 2019. Buku SOIC 2019 ini merupakan pembaruan dan penajaman dari buku SOIC 2017 yang telah diterbitkan BPIW.



07

National Urban Development Project (NUDP) diharapkan dapat menjadi *platform* koordinasi perencanaan perkotaan. Termasuk, pembangunan infrastruktur PUPR dalam meningkatkan kapasitas kota. Hal itu terungkap dalam seminar NUDP di Jakarta, (5/7/2019). Kegiatan NUDP yang mendapat bantuan Bank Dunia ini akan dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024 dan BPIW sebagai *executing agency*.

Pakar perencanaan dari Kemitraan Habitat Imam .S. Ernawi mengingatkan, pelaksanaan NUDP jangan melupakan komitmen Indonesia untuk turut mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan 2030 yang telah dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam *goals* yang kesebelas menyebutkan bahwa kota-kota atau permukiman seharusnya menjadi permukiman yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.



NUDP Tingkatkan Koordinasi Perencanaan Perkotaan

Juli



BPIW Siapkan Draft Renstra

Pidato Presiden terpilih, Joko Widodo, yang berjudul “Visi Indonesia” akan menjadi bagian dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Pidato presiden itu memuat lima poin inti amanah mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran.

Di sektor infrastruktur sendiri, Presiden mengamanatkan untuk membangun konektivitas dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, serta tambak perikanan. Hal tersebut disinggung Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti saat membuka acara paparan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR di Aula Gedung Menteri PUPR, (22/7/2019).

Beberapa daerah di Indonesia sampai saat ini masih mengalami bencana alam. Mengingat pentingnya upaya mengantisipasi masalah tersebut, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono aspek kebencanaan dimasukkan dalam *National Urban Development Project* (NUDP) yang saat ini tengah dibuat.

Program tersebut menjembatani penataan tata ruang, infrastruktur, dan implementasi penataan kota-kota di Indonesia. “Karena kebanyakan produk yang lama belum ada aspek kebencanaan. Oleh karenanya kita masukkan aspek ini. Jadi dalam NUDP ini kita mendampingi daerah untuk menyusun rencana tata ruang,” ujar Hadi saat talkshow “Indonesia Bicara” di TVRI (25/7/2019).

Aspek Kebencan- naan Dalam Peren- canaan



Fokus Bangun Aksesibilitas Danau Toba



Danau Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan super prioritas yang dikembangkan pemerintah. Terkait hal itu Kementerian PUPR memfokuskan pada dukungan aksesibilitas menuju destinasi wisata tersebut.

“Kita memperbanyak aksesibilitas, karena wisatawan itu harus punya banyak pilihan, baik dari udara, laut, maupun darat,” ujar Hadi Sucahyono disela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tano Ponggol Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019). Dibangunnya ketiga akses itu bertujuan memberikan keleluasaan bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan ke Danau Toba.

08

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu KSPN super prioritas untuk dikembangkan. Untuk pengembangan KSPN super prioritas tersebut Pemerintah mendapat dukungan Bank Dunia melalui *Integrated Tourism Development Program* (ITDP). Saat ini Pemerintah terus menajamkan substansi *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) KSPN Borobudur dan sekitarnya sebagai pedoman bersama dalam implementasi pengembangannya.

Hal itu terungkap dalam kunjungan lapangan rombongan BPIW Kementerian PUPR yang didampingi Balai Konservasi Borobudur ke KSPN Borobudur dan sekitarnya di Yogyakarta serta Jawa Tengah, Jumat (9/8/2019).



Pengembangan Terpadu KSPN Borobudur

Agustus

Tingkat Maturitas SPIP BPIW

Untuk tahun 2019 tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditargetkan dapat mencapai level 4 atau terkelola dan terukur. Dalam upaya mencapai level 4 itu telah ditetapkan Keputusan Kepala BPIW Nomor 14/KPTS/KW/2019 tentang Satuan tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPIW.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchyono saat membuka "Workshop SPIP dan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan BPIW TA 2019" yang dilaksanakan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (26/8).

Hadi Suchyono menerangkan, pada tahun 2018 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penilaian atas tingkat maturitas SPIP di BPIW dengan nilai 3,1955 yaitu level 3 atau terdefinisi. "Kategori terdefinisi, memberikan gambaran bahwa BPIW telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun pelaksanaan praktik pengendalian intern tersebut belum dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi, serta belum dilakukan pengembangan berkelanjutan atas hasil evaluasi," papar Hadi.



BPIW Lakukan Review WPS

BPIW tengah mereview terhadap rencana induk 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menjelaskan, perubahan pada rencana induk 35 WPS tersebut dipicu oleh perubahan dinamika yang terbilang pesat. "Salah satunya seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur," ungkap Hadi kepada wartawan di Kantor BPIW, Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, kondisi lapangan di WPS juga sudah mengalami banyak perubahan seiring pesatnya pembangunan infrastruktur pada 4 tahun terakhir. "Banyaknya infrastruktur baru telah mengubah lanskap di wilayah pengembangan. Seperti di Sumatera, kehadiran jalan tol Trans-Sumatera perlu memantik gairah pertumbuhan ekonomi baru sehingga perencanaan infrastruktur harus direncanakan.



09

Kawasan perkotaan di Indonesia berkembang dengan pesat, di mana sejak 2010, lebih dari setengah dari populasi penduduk di Indonesia tinggal di perkotaan. Pertumbuhan populasi tinggi di wilayah perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan infrastruktur terpadu.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyampaikan hal itu saat memberi kata sambutan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di acara *The 55th International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) World Planning Congress*, di Bogor (9/9/2019). Acara ini berlangsung 9 sampai 13 September.

Persoalan Perkotaan Jadi Tantangan



September

BPIW Kembangkan Kawasan Strategis



BPIW menerapkan empat strategi dalam menyusun perencanaan untuk pengembangan infrastruktur PUPR di Indonesia pada 2015-2019. “Keempat strategi itu antara lain, pertama mengembangkan infrastruktur menuju pembangunan wilayah yang seimbang. Kedua, mengembangkan infrastruktur dasar untuk mengatasi urbanisasi yang tinggi, dan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga pemanfaatan dan pengembangan sumber daya untuk nilai tambah guna mencapai ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Adapun strategi keempat yakni, meningkatkan konektivitas wilayah, darat dan laut untuk meningkatkan daya saing nasional,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam acara “Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Dialog” di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Untuk rencana kerja tahun 2020, BPIW telah menyiapkan program dukungan pada kawasan-kawasan strategis di Tanah Air. Seperti perencanaan pengembangan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan dan lainnya.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, yakni Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), serta BPIW di Jakarta, (10/9).

4 Strategi BPIW Kembangkan Infrastruktur



Pelantikan Tiga Pejabat BPIW

Tiga pejabat baru mengisi posisi kosong di lingkungan BPIW. Ketiga pejabat baru itu, antara lain M. Rudi Siahaan menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kemudian, Budianto Prasetyo menjabat Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan Entatarina Simanjuntak menjabat Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Pejabat yang mendapat promosi di lingkungan Kementerian PUPR dilantik langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (13/9/2019).



09
September

Kementerian PUPR bergerak cepat dalam melakukan penataan kawasan Puncak Waringin di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, untuk mendukung pariwisata di KSPN Labuan Bajo dengan membangun beberapa bangunan seperti tempat penjualan *merchandise* dan gardu pandang. Ditargetkan dalam 150 hari kalender pekerjaan Penataan Bangunan Kawasan Puncak Waringin yang dilakukan Ditjen Cipta Karya tersebut, sudah selesai dibangun. Saat meninjau (27/9/2019), Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan bahwa proyek itu merupakan bagian dari dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan destinasi pariwisata super prioritas tersebut. Nantinya juga akan dilakukan revitalisasi pelabuhan di kawasan Labuan Bajo. Pelabuhan itu berada tak jauh dari Puncak Waringin.



Penataan Kawasan Puncak Waringin

10
Oktober

BPIW kembali menggelar Rapat Koordinasi Penajaman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2021 dan Jangka Pendek 2022-2024 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur PUPR. Kali ini, acara tersebut digelar di Kota Mataram, NTB (23/10/2019).

Acara di Kota Mataram tersebut untuk pembahasan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan tersebut harus menghasilkan substansi untuk memberikan masukan pada RPJMN 2020-2024 yang tengah disusun Bappenas. Khususnya, terkait pengembangan infrastruktur dan wilayah.

BPIW Libatkan Seluruh Provinsi

Urbanisasi kini perlu dinilai sebagai peluang untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan antara pembangunan ekonomi dan urbanisasi telah terjalin dengan baik.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono saat paparan "Mewujudkan Perkotaan dan Permukiman Inklusif di Indonesia" dalam *High-level Roundtable on "Asian Cities: Fostering Growth and Inclusion"* di Jakarta, 30/10/2019.



Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi



Kegiatan Pengembangan SDM BPIW



10
Oktober

Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, BPIW Kementerian PUPR menggelar kegiatan "Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BPIW melalui Peningkatan Komunikasi dan Kerja Sama Tim" di Bogor, Jawa Barat, 9-10 Oktober 2019. Kegiatan ini diikuti seluruh unit kerja di lingkungan BPIW.

Kepala BPIW, Hadi Suchayono mengatakan, adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian, kebersamaan, kekompakan, komunikasi yang harmonis. "Kalau itu semua terbawa pada suasana kerja, kinerja setiap unit kerja di BPIW akan meningkat," terangnya.

Hadi menjelaskan, tugas perencanaan dan pemrograman merupakan kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Kementerian PUPR berkomitmen mendukung pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Salah satunya pengembangan KSPN Danau Toba. Pada 2019 anggaran untuk pengembangan infrastruktur PUPR di Danau Toba sebesar Rp 944 miliar dan pada 2020 meningkat menjadi Rp 2,5 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Hadi Suchayono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di sela-sela kegiatan "Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Glamorous Camping" di Kawasan Toba Caldera Resort Toba Samosir, Sumatera Utara, 14/10/2019.



**Anggarkan
Rp 2,5 Triliun
untuk KSPN
Danau Toba**

11
November



BPIW Harus Menjadi *Leader* dalam Perencanaan

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menegaskan, BPIW harus menjadi *leader* dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR.

Pesan tersebut disampaikan saat menjadi *keynote speaker* pada acara BPIW Expo 2019 di Auditorium Kementerian PUPR Kamis (7/11/2019), dalam acara "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berkelanjutan". Basuki menambahkan, kedepan BPIW harus lebih kuat dalam melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"BPIW sekarang telah berusia lima tahun, sudah seharusnya sudah dapat lebih mandiri dan berinovasi," tutur Basuki.

BPIW berupaya terus melakukan penajaman program dan kegiatan 2020-2024. Kepala BPIW, Hadi Suahyono mengatakan, keberadaan BPIW sebagai *leader* dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR sangat ditunggu banyak pihak.

"Untuk itu BPIW memang harus mampu menampilkan kinerja terdepan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, khususnya pada kawasan prioritas," ungkap Hadi saat membuka Kegiatan Penajaman Program dan Kegiatan 2020-2024, di Jakarta (14/11/2019)

BPIW Tajamkan Program dan Kegiatan 2020-2024



Rest Area Terpadu Rambut Siwi Mulai Dimanfaatkan

Kementerian PUPR melalui BPIW menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) Rest Area Terpadu Rambut Siwi untuk digunakan sementara oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Kementerian PUPR dengan Pemkab Jembrana, di Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (20/11/2019).

Penandatanganan Kementerian PUPR diwakili Kepala BPIW, Hadi Sucahyono dan Pemkab Jembrana diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jembrana, I Made Sudiada. Hadi Sucahyono mengatakan, pemanfaatan Rest Area Terpadu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Bali pada umumnya dan khususnya wilayah Jembrana dan sekitarnya.



11
November

Kementerian PUPR melalui BPIW kembali menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) Rest Area Terpadu. Rest Area Terpadu Bendungan Tugu diserahkan untuk digunakan sementara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. "Pembangunan Rest Area Terpadu Bendungan Tugu sudah selesai dibangun Kementerian PUPR. Untuk mempercepat pemanfaatannya, kami menyerahkan sementara BMN tersebut kepada Pemprov Jatim agar dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya," terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono kepada wartawan se usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak



Rest Area Terpadu Bendungan Tugu Mulai Dimanfaatkan

12
Desember



Kementerian PUPR Miliki Sembilan Arah Kebijakan 2020-2024

Kementerian PUPR saat ini memiliki sembilan arah kebijakan untuk periode 2020-2024. Arah kebijakan tersebut diciptakan dalam upaya pemenuhan visi Presiden-Wakil Presiden dalam pembangunan infrastruktur.

Sembilan Arah Kebijakan 2020-2024 tersebut, ungkap Hadi, diantaranya adalah mempercepat pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang. "Hal ini fokus prioritas di Papua, seperti pada bidang permukiman antara lain, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Provinsi Papua, pembangunan prasarana olahraga dan kewirausahaan Universitas Cendrawasih dan Musamus Kab. Merauke," jelas Hadi dalam Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah, Kemendagri, di Jakarta 11/12/2019.

BPIW terus menggodok substansi Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur PUPR. Kali ini, pembahasan Rapermen tersebut dilakukan di Batam pada Kamis-Jumat, 12-13/12/2019.

Menurut Hadi, produk perencanaan yang disusun BPIW perlu menjadi rujukan dalam implementasi perencanaan unor lain di Kementerian PUPR. "Keberadaan Permen ini akan menjadi payung aturan dalam implementasinya," ungkap Hadi saat membuka rapat pembahasan Rapermen yang dihadiri perwakilan seluruh unor di lingkungan Kementerian PUPR.



BPIW Susun Rapermen Libatkan Unor

Sosialisasikan NUDP pada Kota Peserta

BPIW menggelar sosialisasi pelaksanaan *National Urban Development Project* (NUDP), program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia 13/12/2019.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari enam kota peserta atau pilot project NUDP, yaitu Kota Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar dan Metropolitan Bandung.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono dalam sambutannya menerangkan, penyediaan infrastruktur di kawasan perkotaan di Tanah Air saat ini masih kurang akibat berbagai faktor, mulai dari pendanaan, kelembagaan, regulasi dan lainnya. Padahal keberadaan infrastruktur sangat penting,



12

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyampaikan enam rekomendasi dalam rangka upaya mengatasi persoalan yang dihadapi kota-kota di Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat memaparkan Metropolitan *Infrastructure Development Strategies* dalam *The 31st South-South Knowledge Exchange Workshop* di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

BPIW Rekomendasikan Enam Solusi Perkotaan

Desember

BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Bukapalipatar

BPIW mendukung pengembangan Kawasan Bukapalipatar yang berada di Sumatera Barat terdiri dari Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, dan Tanah Datar. Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama dari segi pariwisata.

Kepala BPIW, Hadi Suchayono menyatakan saat ini tengah dilakukan *updating* terkait kawasan tersebut. "*Updating* dilakukan mengingat potensi wilayah serta memperhatikan masalah yang ada di sana," ujar Hadi saat menggelar rapat terkait kawasan Bukapalipatar itu di ruang rapat BPIW, Senin, 2/12/2019.



Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk menandatangani perpanjangan kesepakatan kerja sama *Memorandum of Cooperation (MoC) on Infrastructure Development Cooperation* yang berakhir pada 29 Desember 2019.

Penandatanganan kesepakatan tersebut diwakili oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dengan *Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)* Jepang, Akaba Kazuyoshi di Gedung Kementerian PUPR, Kamis (26/12/2019). Pada kesempatan tersebut turut hadir, Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono

Indonesia-Jepang Sepakat Perpanjang Kerja Sama



BPIW Turut Semarakkan Kegiatan Harbak PU ke-74

Guna turut serta memeriahkan Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) ke 74, jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk menyemarakkan peringatan Harbak PU ke 74, mulai dari olahraga dan lomba seni.



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengikuti senam sehat yang digelar dalam memperingati Harbak PU ke 74.



Tim Tennis Meja BPIW di sela-sela pertandingan. Tim Tennis Meja BPIW tampil sebagai juara 3.



Tim Bola Basket BPIW menguasai bola saat tampil dalam kompetisi.



Tim Bulu Tangkis BPIW foto bersama sebelum beraksi di lapangan.



Tim Poco-poco Nusantara BPIW saat tampil di depan juri.

Upacara Peringatan Harbak PU ke 74



Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tampil sebagai inspektur upacara menyampaikan amanah Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam rangka memperingati Harbak PU ke 74, jajaran BPIW Kementerian PUPR turut mengikuti upacara bendera dengan menggunakan pakaian adat nusantara yang digelar Kementerian PUPR pada, Selasa 3 Desember 2019 di lapangan upacara Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.



Kelompok Paduan Suara BPIW mengiringi upacara bendera Harbak PU ke 74.



Jajaran pejabat dan pegawai BPIW foto bersama se usai mengikuti upacara bendera peringatan Harbak PU ke 74.



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono bersama jajaran BPIW sesaat setelah upacara bendera peringatan Harbak PU ke 74.



Jajaran BPIW sesaat sebelum upacara bendera peringatan Harbak PU ke 74.

Upacara Peringatan Hari Ibu

Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, jajaran BPIW Kementerian PUPR turut memperingatinya dengan mengikuti upacara bendera yang digelar Kementerian PUPR pada Senin 23 Desember 2019 di lapangan upacara Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.



Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti tampil sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ibu di Kantor Kementerian PUPR.



Kaum Ibu dari jajaran BPIW berdiri terdepan saat mengikuti upacara.



Jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR turut menghadiri upacara yang memperingati Hari Ibu.



Koprs Musik PUPR mengiringi upacara peringatan Hari Ibu di Kementerian PUPR.



Pasukan Pengibar Bendera yang tampil juga semua kaum ibu.

*Segenap Pimpinan dan Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengucapkan:*

Selamat Tahun Baru 2020



Survey Pembaca

Buletin Sinergi 2019

Survey Pembaca Buletin BPIW 2019

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap konten Buletin Sinergi BPIW, kami mohon bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi dan men-submit form ini. Mohon dapat mengisi semua pertanyaan untuk mendapatkan cinderamata dari kami (selama persediaan masih ada).

Souvenir dapat diambil langsung di Ruang Redaksi; Gedung G BPIW Jl. Pattimura no. 20 Kebayoran Baru, Jakarta (Komplek Kementerian PUPR) tlp: 021-27515804

Terimakasih.

Nama

Your answer _____

Instansi

Your answer _____

Nomor HP

Buletin Sinergi?

- Ya
 Tidak



Buletin Sinergi BPIW mengadakan Survey Pembaca untuk penerbitan Buletin Sinergi tahun 2019. Mohon berkenan mengisi untuk perbaikan Buletin Sinergi ke depannya. Disediakan souvenir bagi yang mengisi, selama persediaan masih ada.

Caranya:

1. Download Apps di HP Android Anda: QR Code Reader
2. Buka aplikasi tersebut & scan arahkan CR Code disamping kanan ini:

Atau jika melalui PC/Laptop, kunjungi web Link Survey: shorturl.at/kFH57

